



PENETAPAN

Nomor 0184/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Park See Yang bin You Hee Sun, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl Kp Gurubug No. 19A. RT.001 RW.004 Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai "Pemohon I";

Kholifatun Nisa binti Kasmuri, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus / Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl Kp Gurubug No. 19A. RT.001 RW.004 Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai "Termohon II";

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor : 0184/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan 0184/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



2. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan surat keterangan suami istri nomor ; 287/Ds.Psl/II/2018 yang di keluarkan oleh kantor kepala Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Tertanggal 23 Februari 2018;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 49 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 25 tahun dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Kasmuri dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Haji Chaeran Hidayat dan Moch Machtun dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun dikarenakan para Pemohon tidak memahami proses administrasi, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan 0184/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 2011 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Park See Yang bin You Hee Sun) dan Pemohon II (Kholifatun Nisa Binti Kasmuri) untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Park See Yang, tanggal 28-08-2017, yang dikeluarkan oleh Kantor imigrasi Klas I Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3603281005/SURKET/01/101017/0018, tanggal 10-10-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 30 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan 0184/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



4. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Islam tertanggal 26 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Ar Rahmah Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 287/Ds.Ps/II/2018 tanggal 23 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Embassy Of The Republik Of Korea tanggal 30 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

B. Saksi :

1. H. Machtum bin Akhmad Suhemi, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jl. Kom. Odo II No.11 RT.008 RW.009 Kelurahan Cibodas Baru Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Provinsi Banten dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal tanggal 26 Oktober 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah duda cerai hidup namun telah mendapat izin untuk menikah dengan Pemohon II dari pemerintah Korea dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kasmuri;
- Bahwa saksi 2 orang masing-masing bernama: Haji Chaeran

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan 0184/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



Hidayat dan Moch Machtun;

- Bahwa Mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan Qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah amil;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini para Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa karena petugas yang dimintakan bantuan untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon, ternyata lalai sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuannya adalah untuk alas hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

2. Mochammad Kasmuri bin Suwarga, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Kom. Odo II No.7 RT.008 RW.009 Kelurahan Cibodas Baru Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Provinsi Banten dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal tanggal 26 Oktober 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan 0184/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah duda cerai hidup namun telah mendapat izin untuk menikah dengan Pemohon II dari pemerintah Korea dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kasmuri;
 - Bahwa saksi 2 orang masing-masing bernama: Haji Chaeran Hidayat dan Moch Machtun;
 - Bahwa Mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
 - Bahwa Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan Qobul diucapkan oleh Pemohon I;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah amil;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
 - Bahwa selama berumah tangga para Pemohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa selama ini para Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
 - Bahwa karena petugas yang dimintakan bantuan untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon, ternyata lalai sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;
 - Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa tujuannya adalah untuk alas hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap para pemohonannya dan mohon

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan 0184/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, yang dilaksanakan secara syari'at Islam dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan tidak ada biaya, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai P.6, yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan 0184/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal 26 Oktober 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, dan belum dikarunia anak;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Kasmuri dan dihadiri 2 orang saksi dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah duda cerai hidup namun telah mendapat izin untuk menikah dengan Pemohon II dari pemerintah Korea dan status Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan 0184/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-BahwaUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-BahwaUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-BahwaUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-BahwaUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan keterangan para saksi ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan dengan status masing-masing jejak dan perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau poligami liar, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan 0184/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan dan sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya : "Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Oktober

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan 0184/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas Kota Tangerang yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Park See Yang bin You Hee Sun**) dengan Pemohon II (**Kholifatun Nisa binti Kasmuri**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas Kota Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan 0184/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). /Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Samsul Fadli, S. Pd.,S.H. sebagai Ketua Majelis Drs. Jaenudin serta, dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Samsul Fadli, S.Pd.,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan 0184/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan 0184/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)